

DOI: [10.36232/fair.v5i2.6438](https://doi.org/10.36232/fair.v5i2.6438)

Article History:

Received: 2024-11-17

Revised: 2025-07-19

Accepted: 2024-12-30

FAIR: FINANCIAL & ACCOUNTING
INDONESIAN RESEARCH
Vol 5, Issue 2, (2025), 112-128

Makro Akuntansi dalam Menjelaskan Krisis Biaya Hidup: Peran Mediasi Kebijakan Upah Minimum Regional

Yusron Difinubun ¹¹, Alyn Wulandary ^{22*}, Musriani, Musriani³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Kabupaten Sorong, Indonesia

ABSTRACT

Purpose: This study analyzes the effects of money supply, oil price increases, and the COVID-19 pandemic on the Cost of Living Crisis through the mediating role of Regional Minimum Wage (RMW) in Sorong City using a Public Macro Accounting perspective.

Methodology/approach: An exploratory sequential mixed-method design was employed. Qualitative data were obtained through interviews with 17 informants across six districts, while quantitative data were collected from 397 respondents using structured questionnaires. Data were analyzed using the Miles and Huberman qualitative analysis model and Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM).

Findings: The results indicate that money supply and oil price increases have positive and significant effects on the Cost of Living Crisis. The COVID-19 pandemic does not have a significant direct effect, although it significantly influences the crisis indirectly through Regional Minimum Wage. Regional Minimum Wage significantly affects the Cost of Living Crisis and successfully mediates the relationships between money supply, oil price increases, and the COVID-19 pandemic with the Cost of Living Crisis.

Practical implications: The findings provide empirical evidence for policymakers to strengthen wage-setting policies, inflation control, and regional economic resilience, particularly in eastern Indonesia.

Originality/value: This study contributes to Public Macro Accounting literature by positioning Regional Minimum Wage as a policy transmission mechanism linking macroeconomic variables to the Cost of Living Crisis in an underexplored regional context.

Keywords: Cost Of Living Crisis; Covid-19 Pandemic; Money Supply; Oil Price; Regional Minimum Wage.

*Corresponding Author : alynwulandari@email.com (author#2)

PENDAHULUAN

Krisis biaya hidup (*Cost of Living Crisis*) menjadi salah satu tantangan ekonomi global yang memperoleh perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. World Economic Forum menempatkan krisis biaya hidup sebagai salah satu risiko global utama yang memengaruhi stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan. Fenomena tersebut ditandai oleh meningkatnya harga barang dan jasa secara signifikan akibat inflasi, kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok global, perubahan kebijakan moneter, dan dampak pascapandemi COVID-19. Akibatnya, daya beli masyarakat mengalami penurunan meskipun pendapatan nominal mengalami peningkatan.

Di Indonesia, tekanan krisis biaya hidup tidak terjadi secara merata karena dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi setiap daerah. Kota Sorong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia memiliki biaya logistik yang tinggi sehingga lebih rentan terhadap perubahan harga energi dan inflasi dibandingkan wilayah lain. Kenaikan harga minyak menyebabkan peningkatan biaya distribusi barang, sementara perubahan jumlah uang beredar turut memengaruhi tekanan inflasi. Di sisi lain, pemerintah merespons kondisi tersebut melalui penyesuaian Upah Minimum Regional (UMR) sebagai instrumen kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun demikian, efektivitas UMR dalam meredam dampak krisis biaya hidup masih menjadi perdebatan.

Sebagian besar penelitian terdahulu menganalisis *Cost of Living Crisis* menggunakan perspektif ekonomi makro dengan menempatkan inflasi, jumlah uang beredar, harga energi, maupun pertumbuhan ekonomi sebagai determinan utama. Penelitian tersebut lebih menekankan hubungan langsung antarvariabel ekonomi tanpa menjelaskan mekanisme kebijakan pemerintah yang menghubungkan perubahan kondisi makroekonomi dengan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan empiris mengenai bagaimana kebijakan pengupahan berperan sebagai mekanisme transmisi dalam mengurangi dampak krisis biaya hidup.

Penelitian ini menggunakan Teori Makro Akuntansi Publik sebagai perspektif utama dalam menjelaskan hubungan antara faktor-faktor makroekonomi dengan *Cost of Living Crisis*. Makro Akuntansi Publik memandang bahwa informasi keuangan pemerintah, kebijakan fiskal, dan instrumen akuntabilitas publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sarana menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan kebijakan ekonomi. Selain itu, penelitian ini didukung oleh Teori Keynesian yang menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang beredar dan kebijakan fiskal pemerintah memengaruhi tingkat permintaan agregat serta inflasi. *Quantity Theory of Money* menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang beredar dalam perekonomian akan meningkatkan tingkat harga apabila tidak diimbangi oleh peningkatan output. Selanjutnya, teori *Cost-Push Inflation* menjelaskan bahwa kenaikan harga energi, khususnya minyak, meningkatkan biaya produksi dan distribusi sehingga menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Dalam konteks kebijakan publik, penyesuaian Upah Minimum Regional dipandang sebagai instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas negara dalam melindungi kesejahteraan pekerja.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif terhadap inflasi dan peningkatan biaya hidup. Penelitian lain menemukan bahwa kenaikan harga minyak meningkatkan biaya produksi, biaya distribusi, serta mendorong

© 2021 fair. all rights reserved

<https://e-journal.unimudasorong.ac.id/index.php/FAIR/index>

kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga memperburuk *Cost of Living Crisis*. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, penelitian mengenai Upah Minimum Regional menghasilkan temuan yang beragam. Sebagian penelitian menyatakan bahwa peningkatan UMR mampu meningkatkan daya beli masyarakat, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa kenaikan upah belum tentu mampu mengimbangi laju inflasi sehingga tidak selalu efektif mengurangi tekanan biaya hidup. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih menguji hubungan langsung antarvariabel ekonomi. Penelitian yang menempatkan Upah Minimum Regional sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara faktor-faktor makroekonomi dengan *Cost of Living Crisis* masih sangat terbatas, khususnya dalam perspektif Makro Akuntansi Publik.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh jumlah uang beredar, kenaikan harga minyak, dan pandemi COVID-19 terhadap *Cost of Living Crisis* melalui peran mediasi Upah Minimum Regional di Kota Sorong. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menempatkan UMR sebagai variabel independen atau variabel kontrol, penelitian ini mengembangkan model konseptual yang memosisikan UMR sebagai mekanisme transmisi kebijakan pemerintah dalam menjelaskan hubungan antara faktor-faktor makroekonomi dan krisis biaya hidup. Kontribusi penelitian terletak pada pengembangan perspektif Makro Akuntansi Publik, yaitu dengan menempatkan kebijakan pengupahan sebagai bagian dari akuntabilitas fiskal pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Selain memberikan bukti empiris dari wilayah Indonesia Timur yang masih jarang diteliti, penelitian ini juga memperluas literatur mengenai hubungan antara kebijakan publik, akuntansi sektor publik, dan *Cost of Living Crisis*.

Berdasarkan Teori Keynesian dan *Quantity Theory of Money*, peningkatan jumlah uang beredar akan meningkatkan permintaan agregat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Oleh karena itu, semakin besar jumlah uang beredar diperkirakan akan meningkatkan tekanan *Cost of Living Crisis*. Dalam perspektif Makro Akuntansi Publik, pemerintah merespons perubahan kondisi makroekonomi melalui kebijakan penetapan Upah Minimum Regional. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga UMR diperkirakan memediasi hubungan antara jumlah uang beredar, kenaikan harga minyak, serta pandemi COVID-19 terhadap *Cost of Living Crisis*.

Jumlah uang beredar merupakan salah satu instrumen utama kebijakan moneter yang memengaruhi stabilitas perekonomian. Menurut *Quantity Theory of Money* yang dikemukakan oleh Irving Fisher, peningkatan jumlah uang beredar akan meningkatkan permintaan agregat masyarakat. Apabila peningkatan permintaan tersebut tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas produksi, maka akan terjadi kenaikan tingkat harga secara umum atau inflasi. Inflasi yang terus meningkat menyebabkan kemampuan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi menurun sehingga memicu terjadinya krisis biaya hidup. Dalam perspektif Keynesian, jumlah uang beredar juga berperan dalam memengaruhi konsumsi, investasi, dan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa jumlah uang beredar memiliki hubungan yang positif dengan inflasi dan biaya hidup masyarakat. Peningkatan likuiditas dalam perekonomian cenderung meningkatkan konsumsi rumah tangga sehingga tekanan permintaan terhadap barang dan jasa menjadi lebih besar. Di sisi lain, apabila

penawaran barang tidak mampu mengimbangi peningkatan permintaan tersebut, maka harga akan meningkat. Kondisi tersebut lebih terasa pada wilayah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan barang dari luar daerah, karena kenaikan permintaan akan segera diikuti oleh kenaikan harga akibat keterbatasan distribusi dan tingginya biaya logistik.

Dalam konteks Kota Sorong, peningkatan jumlah uang beredar diperkirakan akan meningkatkan tekanan inflasi yang kemudian berdampak pada meningkatnya biaya hidup masyarakat. Ketergantungan terhadap distribusi barang dari luar Papua menyebabkan perubahan permintaan relatif cepat diterjemahkan menjadi kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Oleh karena itu, semakin besar jumlah uang yang beredar, semakin besar pula potensi meningkatnya krisis biaya hidup di Kota Sorong. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap krisis biaya hidup di Kota Sorong.

Harga minyak merupakan salah satu komponen strategis dalam perekonomian karena hampir seluruh aktivitas produksi, transportasi, dan distribusi bergantung pada energi. Menurut Cost-Push Inflation Theory, kenaikan harga minyak akan meningkatkan biaya produksi perusahaan sehingga produsen cenderung menaikkan harga jual barang dan jasa. Akibatnya, tingkat inflasi meningkat dan biaya hidup masyarakat menjadi lebih tinggi. Kenaikan harga energi juga memengaruhi biaya distribusi barang antarwilayah, terutama pada daerah kepulauan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi laut.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi harga minyak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat inflasi dan biaya hidup masyarakat. Peningkatan harga bahan bakar akan memperbesar biaya logistik, distribusi, dan operasional sektor industri sehingga harga barang kebutuhan pokok ikut mengalami kenaikan. Dampak tersebut menjadi semakin besar pada daerah yang sebagian besar kebutuhan konsumennya berasal dari luar wilayah. Oleh karena itu, harga minyak sering dianggap sebagai salah satu determinan utama dalam pembentukan inflasi biaya (*cost-push inflation*).

Kota Sorong memiliki karakteristik ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh biaya distribusi karena sebagian besar kebutuhan pokok dipasok dari luar daerah. Kenaikan harga minyak akan meningkatkan biaya transportasi laut maupun darat sehingga harga barang konsumsi masyarakat meningkat. Kondisi tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat dan memperbesar risiko terjadinya krisis biaya hidup. Berdasarkan argumentasi teoritis dan empiris tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kenaikan harga minyak berpengaruh positif terhadap krisis biaya hidup di Kota Sorong.

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu guncangan ekonomi global yang memberikan dampak besar terhadap stabilitas perekonomian dunia. Menurut *Economic Shock Theory*, pandemi termasuk dalam kategori *external shock* yang mampu mengganggu keseimbangan ekonomi melalui penurunan aktivitas produksi, terganggunya rantai pasok, meningkatnya biaya distribusi, serta menurunnya kesempatan kerja. Gangguan tersebut menyebabkan harga berbagai barang mengalami peningkatan akibat berkurangnya pasokan, sementara kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mengalami penurunan.

Berbagai penelitian selama masa pandemi menunjukkan bahwa Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya biaya hidup masyarakat melalui kenaikan harga pangan, biaya transportasi, dan biaya kesehatan. Pembatasan mobilitas serta gangguan distribusi internasional menyebabkan kelangkaan berbagai komoditas sehingga harga barang meningkat. Selain itu, banyak perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja maupun membatasi produksi sehingga daya beli masyarakat ikut mengalami penurunan. Kombinasi antara kenaikan harga dan penurunan pendapatan tersebut menjadi salah satu penyebab utama terjadinya krisis biaya hidup di berbagai negara.

Dalam konteks Kota Sorong, pandemi Covid-19 diperkirakan memberikan dampak terhadap meningkatnya biaya hidup melalui terganggunya distribusi barang antarpulau dan meningkatnya biaya logistik. Walaupun kondisi ekonomi mulai mengalami pemulihan, dampak pandemi masih dapat dirasakan melalui perubahan struktur harga, pola konsumsi masyarakat, serta penyesuaian kebijakan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pandemi Covid-19 diperkirakan memiliki pengaruh terhadap krisis biaya hidup di Kota Sorong. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut.

H3: Pandemi Covid-19 berpengaruh positif terhadap krisis biaya hidup di Kota Sorong.

Upah Minimum Regional (UMR) merupakan instrumen kebijakan ketenagakerjaan yang ditetapkan pemerintah untuk menjamin pekerja memperoleh pendapatan minimum yang mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Dalam perspektif *Living Wage Theory*, tingkat upah harus disesuaikan dengan perkembangan biaya hidup sehingga pekerja tetap memiliki daya beli yang memadai. Sementara itu, *Keynesian Macroeconomic Theory* menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat melalui kebijakan pengupahan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga sebagai salah satu komponen utama permintaan agregat. Namun demikian, kenaikan upah juga dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan sehingga memicu kenaikan harga barang dan jasa apabila tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara upah minimum dan biaya hidup bersifat dinamis. Di satu sisi, kenaikan upah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga. Di sisi lain, perusahaan sering kali mengalihkan tambahan biaya tenaga kerja kepada konsumen melalui kenaikan harga produk. Kondisi tersebut menciptakan mekanisme *wage-price spiral*, yaitu siklus kenaikan upah yang diikuti oleh kenaikan harga barang dan jasa sehingga biaya hidup masyarakat tetap meningkat. Fenomena ini lebih sering ditemukan pada daerah yang memiliki struktur biaya distribusi tinggi dan ketergantungan terhadap pasokan barang dari luar wilayah.

Dalam konteks Kota Sorong, kenaikan UMR diperkirakan memberikan pengaruh terhadap krisis biaya hidup. Meskipun kenaikan upah bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja, tingginya biaya logistik dan distribusi menyebabkan kenaikan biaya produksi relatif mudah diteruskan ke harga jual barang. Akibatnya, peningkatan pendapatan pekerja belum sepenuhnya mampu mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, semakin tinggi UMR, semakin besar potensi meningkatnya biaya hidup apabila tidak disertai peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H4: Upah Minimum Regional berpengaruh positif terhadap krisis biaya hidup di Kota Sorong.

Menurut *Quantity Theory of Money*, peningkatan jumlah uang beredar akan meningkatkan permintaan agregat sehingga mendorong kenaikan harga barang dan jasa apabila kapasitas produksi tidak bertambah secara proporsional. Kenaikan harga tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat dan mendorong pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan pengupahan agar pekerja tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup. Dalam perspektif *Inflation Transmission Theory*, UMR menjadi salah satu mekanisme penyesuaian yang mentransmisikan dampak inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui perubahan tingkat pendapatan pekerja.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar sering kali diikuti oleh meningkatnya inflasi yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penetapan upah minimum. Pemerintah biasanya menyesuaikan UMR berdasarkan perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi agar daya beli pekerja tetap terjaga. Namun demikian, peningkatan UMR juga meningkatkan biaya produksi perusahaan sehingga sebagian pelaku usaha menyesuaikan harga jual produknya. Akibatnya, kenaikan upah dapat memperkuat tekanan terhadap biaya hidup masyarakat melalui mekanisme tidak langsung.

Dalam penelitian ini, UMR dipandang sebagai variabel mediasi yang menjelaskan bagaimana pengaruh jumlah uang beredar diteruskan menjadi peningkatan biaya hidup masyarakat. Bertambahnya jumlah uang beredar meningkatkan tekanan inflasi, inflasi mendorong penyesuaian UMR, dan kenaikan UMR kemudian meningkatkan biaya produksi serta harga barang di pasar. Oleh karena itu, hubungan antara jumlah uang beredar dan krisis biaya hidup diperkirakan berlangsung melalui mekanisme mediasi UMR. Berdasarkan argumentasi tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H5: Upah Minimum Regional memediasi pengaruh jumlah uang beredar terhadap krisis biaya hidup di Kota Sorong.

Kenaikan harga minyak merupakan salah satu sumber utama inflasi biaya (*cost-push inflation*) karena minyak merupakan input penting dalam proses produksi dan distribusi barang. Ketika harga minyak meningkat, biaya operasional perusahaan mengalami kenaikan sehingga harga barang dan jasa ikut meningkat. Dalam kondisi tersebut, pemerintah maupun pelaku usaha sering melakukan penyesuaian terhadap tingkat upah sebagai upaya mempertahankan daya beli pekerja. Dengan demikian, perubahan harga minyak tidak hanya berdampak langsung terhadap biaya hidup, tetapi juga memengaruhi kebijakan pengupahan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa inflasi akibat kenaikan harga energi menjadi salah satu indikator penting dalam penentuan upah minimum di berbagai negara. Ketika biaya hidup meningkat, tuntutan penyesuaian upah juga meningkat agar pekerja tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, kenaikan upah tersebut kembali meningkatkan biaya produksi perusahaan sehingga harga barang mengalami kenaikan lebih lanjut. Kondisi ini membentuk mekanisme *wage-price spiral*, yaitu hubungan timbal balik antara kenaikan upah dan kenaikan harga yang memperkuat tekanan terhadap biaya hidup masyarakat.

Dalam konteks Kota Sorong, kenaikan harga minyak diperkirakan meningkatkan biaya distribusi barang yang kemudian mendorong penyesuaian UMR sebagai respons terhadap meningkatnya biaya hidup pekerja. Penyesuaian UMR tersebut selanjutnya meningkatkan biaya produksi berbagai sektor usaha sehingga harga barang kembali mengalami kenaikan. Oleh karena itu, UMR diperkirakan menjadi mekanisme mediasi

yang memperkuat hubungan antara kenaikan harga minyak dan krisis biaya hidup. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H6: Upah Minimum Regional memediasi pengaruh kenaikan harga minyak terhadap krisis biaya hidup di Kota Sorong.

Pandemi Covid-19 merupakan guncangan ekonomi global yang menyebabkan terganggunya aktivitas produksi, distribusi, dan pasar tenaga kerja. Menurut Economic Shock Theory, dampak pandemi tidak hanya terjadi secara langsung terhadap perekonomian, tetapi juga memengaruhi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan pengupahan. Penurunan aktivitas ekonomi selama pandemi mengakibatkan banyak perusahaan mengalami penurunan produktivitas, sementara pada masa pemulihan pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui penyesuaian kebijakan upah minimum.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah mengubah struktur pasar tenaga kerja dan proses penetapan upah minimum di berbagai negara. Pada masa awal pandemi, banyak pemerintah menunda atau membatasi kenaikan upah untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha. Namun, setelah memasuki masa pemulihan, meningkatnya inflasi dan biaya hidup menyebabkan penyesuaian UMR kembali dilakukan sebagai upaya melindungi kesejahteraan pekerja. Penyesuaian tersebut kemudian memengaruhi biaya produksi perusahaan dan harga barang di pasar sehingga dampak pandemi tetap dirasakan melalui perubahan struktur biaya ekonomi.

Dalam penelitian ini, pandemi Covid-19 diperkirakan tidak hanya memengaruhi krisis biaya hidup secara langsung, tetapi juga melalui perubahan kebijakan UMR selama proses pemulihan ekonomi. Gangguan ekonomi yang ditimbulkan pandemi menyebabkan pemerintah menyesuaikan kebijakan pengupahan untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Selanjutnya, perubahan UMR tersebut memengaruhi biaya produksi dan harga barang sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya biaya hidup masyarakat. Berdasarkan argumentasi teoritis tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H7: Upah Minimum Regional memediasi pengaruh pandemi Covid-19 terhadap krisis biaya hidup di Kota Sorong.

METODOLOGI

Desain penelitian ini yaitu *Ekploratory Sequential* (Creswell & Creswell, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara menggunakan dan kuesioner. Informan Wawancara berjumlah 17 informan yang tersebar pada 6 distrik dari 10 distrik di kota Sorong: tiga informan distrik Sorong, tiga informan Distrik Sorong Kepulauan, Tiga informan Distrik Sorong Kota, tiga informan Distrik Malaimsimsa, tiga informan Distrik Klaurung, dan dua informan berasal dari Distrik Sorong Timur. Sampel Penelitian berjumlah 397 dari total populasi 254.294. Kuesioner penelitian dibagi dalam dua bentuk yaitu menggunakan angket berbentuk G-form dan kertas kuesioner yang dibagi langsung kepada responden yang tersebar di 10 distrik di kota sorong. Jumlah variabel penelitian yaitu 4 variabel yaitu Uang yang beredar (X1) Kenaikan Harga Minyak (X2) dan UMR (Z) dan Krisis Biaya Hidup (Y) dengan indikator penilaian sebanyak 33 item. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif model Miles and Huberman (Sugiyono, 2018); dan teknik analisis statistik inferensial (Smart-PLS) (Ghozali, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

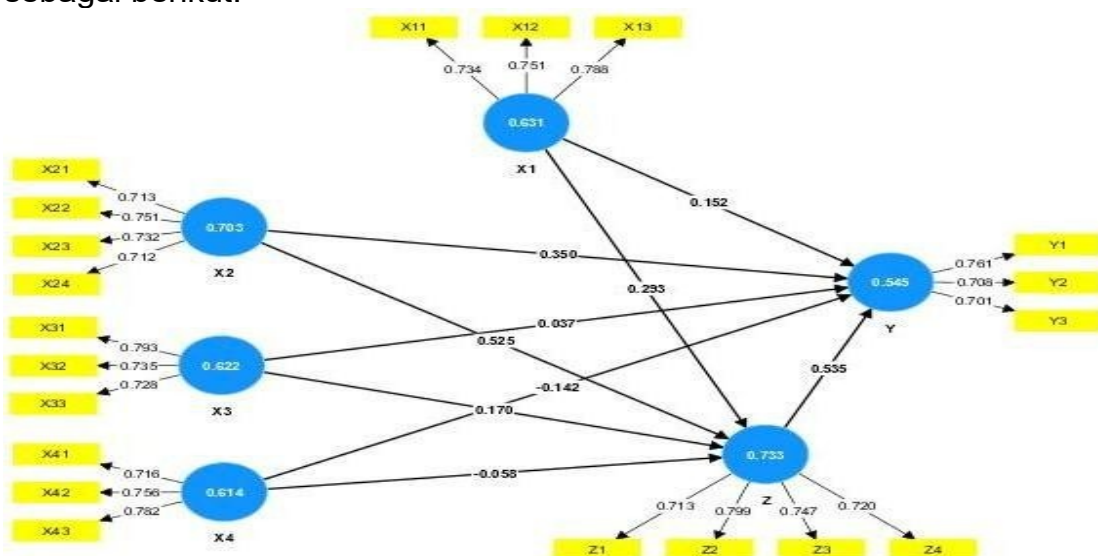
Hasil Penelitian

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan pengujian Validitas konvergen dari model pengukuran dihitung menggunakan loading Factor. Semua indikator memiliki faktor loading diatas 0,7 dan AVE diatas 0,5 (5). Hasil uji *Discriminate Validity* yaitu nilai *cross loading* menunjukkan adanya *Discriminate Validity* yang baik oleh karena nilai korelasi indikator terhadap konstraknya lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator dengan konstruk yang lain. Hasil uji *Composite reliability* > 0,70 (Aday & Aday, 2020); dan *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Hutagaol et al., 2022).

Hasil uji *Inner Model*.

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan dengan menggunakan R Square, Nilai *koefisien Path*, dan nilai t-statistic untuk setiap path (8). Adapun nilai model struktural penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar Output Model Stuktur Hasil Penelitian

Sumber: Output SmartPLS 4

Hasil Pengujian R Square

Tabel 1. Hasil Pengujian R Squer

Konstruk	R Square	Adjusted R Square
Y	0.691	0.686
Z	0.587	0.581

Sumber: Output SmartPLS 4

Tabel diatas menunjukkan nilai R Square untuk konstruk Krisis Biaya Hidup yaitu 0,691 yang berarti Krisis Biaya Hidup mampu dijelaskan oleh Variabel X sebesar 69,1%. Selain itu nilai R Square untuk konstruk UMR yaitu 0,587 yang berarti UMR mampu dijelaskan oleh Variabel X sebesar 53,9%.

Hasil Pengujian Path Coefficients

Tabel 2 Hasil Uji Path Coefisien (*uji Bootstrapping*)

Konstruk	O	T-Statistik	P Value
X1 -> Y	0.152	3.299	0.001
X1 -> Z	0.293	5.080	0.000
X2 -> Y	0.350	4.686	0.000
X2 -> Z	0.525	7.681	0.000
X3 -> Y	0.037	0.999	0.318
X3 -> Z	0.170	3.973	0.000
X4 -> Y	-0.142	1.802	0.072
X4 -> Z	-0.058	0.777	0.437
Z -> Y	0.535	10.855	0.000
X1 -> Z -> Y	0.157	4.436	0.000
X2 -> Z -> Y	0.281	6.426	0.000
X3 -> Z -> Y	0.091	3.729	0.000
X4 -> Z -> Y	-0.031	0.769	0.442

Sumber: Output SmartPLS 4

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan Krisis Biaya Hidup dikota sorong dipengaruhi secara langsung oleh Jumlah Uang yang beredar (X1) Kenaikan Harga Minyak (X2) dan UMR (Z) dan Krisis Biaya Hidup dikota sorong dipengaruhi secara tidak langsung oleh UMR pada variabel (X1) Kenaikan Harga Minyak (X2) dan Pandemi Covid 19. hasil tersebut terlihat dari nilai t statistik > 1,96 (9).

Pembahasan

Jumlah uang yang beredar terhadap Krisis Biaya Hidup

Jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian memiliki dampak signifikan terhadap krisis biaya hidup. Jumlah uang yang beredar di suatu negara mencerminkan likuiditas ekonomi. Ketika jumlah uang yang beredar meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, hal ini dapat menyebabkan inflasi, yang pada gilirannya meningkatkan biaya hidup masyarakat. Teori ekonomi makro menyatakan bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar dapat menyebabkan inflasi jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan output. Ketika lebih banyak uang beredar, daya beli masyarakat meningkat, tetapi jika pasokan barang dan jasa tidak mengikuti, harga akan naik.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa jumlah uang yang beredar berpengaruh signifikan terhadap krisis biaya hidup. Hasil tersebut mengandung arti bahwa semakin tinggi jumlah uang yang beredar tanpa diimbangi pertumbuhan profit akan menyebabkan peningkatan inflasi. Krisis biaya hidup sering kali terjadi ketika inflasi melampaui pertumbuhan pendapatan. Dalam konteks ini, masyarakat akan merasakan tekanan pada daya beli mereka, sehingga kebutuhan dasar menjadi sulit dijangkau. Hal ini menjadi lebih parah di daerah 3T, di mana akses terhadap barang dan jasa terbatas. Masyarakat yang tinggal di daerah ini sering kali mengalami kesulitan lebih besar saat harga-harga naik, karena mereka tidak memiliki alternatif untuk memenuhi kebutuhan.

Secara teoritis, hubungan antara jumlah uang yang beredar dan krisis biaya hidup dapat dijelaskan melalui model permintaan dan penawaran. Ketika permintaan meningkat akibat jumlah uang yang beredar bertambah, tetapi penawaran tetap, harga

barang dan jasa akan naik. Oleh karena itu, penting untuk mengontrol jumlah uang yang beredar agar inflasi dapat dikendalikan, terutama di daerah dengan kerentanan ekonomi. Selain itu menurut teori Monetaris, seperti yang diungkapkan oleh Milton Friedman, menyatakan bahwa inflasi adalah hasil dari pertumbuhan jumlah uang yang beredar yang lebih cepat daripada pertumbuhan output ekonomi. Ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar dapat langsung berkontribusi pada kenaikan harga barang dan jasa.

Dalam prakteknya, kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral berperan penting dalam mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal untuk mencegah terjadinya krisis biaya hidup yang lebih parah. Penelitian menunjukkan bahwa pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter yang tepat dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi di daerah 3T khususnya di daerah sorong.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Mankiw (2014) bahwa inflasi yang tinggi sering kali terkait dengan pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Penelitian ini mendukung argumen bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar dapat berkontribusi pada krisis biaya hidup. Selain itu, Sargent, dan Wallace, (1981) menemukan pertumbuhan jumlah uang yang beredar berhubungan erat dengan inflasi, mendukung argumen bahwa peningkatan uang yang beredar dapat memperburuk krisis biaya hidup. Taylor, (1993). Dalam analisisnya, menemukan bahwa kebijakan moneter yang longgar, menyebabkan peningkatan jumlah uang yang beredar, dapat berkontribusi pada inflasi yang lebih tinggi, mendukung argumen bahwa ini memperburuk krisis biaya hidup. Gali, (2022);(2023), Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan moneter selama pandemi dan menemukan bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar berkontribusi pada inflasi yang lebih tinggi, mendukung argumen bahwa ini memperburuk krisis biaya hidup. Cohen, & Mazzocco, (2023). menyimpulkan bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar selama periode stimulus ekonomi pasca-pandemi berkontribusi pada inflasi yang lebih tinggi, yang meningkatkan biaya hidup bagi banyak keluarga.

Disisi lain hasil penelitian ini tidak searah dengan temuan Barro, (1997). Barro berargumen bahwa hubungan antara jumlah uang yang beredar dan inflasi tidak selalu sederhana dan dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi, menantang pandangan bahwa peningkatan uang selalu menyebabkan inflasi. Sargent, (1982) berargumen bahwa hubungan antara uang dan inflasi lebih kompleks dan dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi, menantang pandangan bahwa peningkatan uang selalu menyebabkan inflasi yang lebih tinggi. Friedman, & Schwartz, (2023) Dalam analisis terbaru mereka, penulis berargumen bahwa hubungan antara jumlah uang yang beredar dan inflasi lebih kompleks dan dipengaruhi oleh ekspektasi pasar, menantang pandangan bahwa peningkatan uang selalu menyebabkan inflasi.

Kenaikan Harga Minyak terhadap Krisis Biaya hidup

Kenaikan harga minyak memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap krisis biaya hidup. Minyak merupakan komoditas penting yang mempengaruhi hampir semua sektor ekonomi, termasuk transportasi, produksi, dan distribusi barang. Teori ekonomi menunjukkan bahwa kenaikan biaya bahan baku, seperti minyak, akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan.

Hasil penelitian menemukan bahwa kenaikan harga minyak berpengaruh terhadap krisis biaya hidup. Hasil tersebut mengandung arti kenaikan harga minyak berdampak langsung pada biaya transportasi dan produksi barang. Ketika harga minyak naik, biaya

transportasi juga meningkat, yang pada gilirannya menyebabkan harga barang-barang kebutuhan pokok naik. Masyarakat di daerah 3T, yang sering kali bergantung pada transportasi untuk mendapatkan barang, akan merasakan dampak ini secara langsung. Kenaikan harga minyak dapat menciptakan efek domino yang memperburuk krisis biaya hidup, terutama bagi mereka yang sudah berada di ambang kemiskinan.

Secara teori, hubungan antara harga minyak dan krisis biaya hidup dapat dianalisis melalui model biaya produksi. Kenaikan harga minyak meningkatkan biaya produksi, yang kemudian diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Hal ini sangat relevan di daerah 3T, di mana infrastruktur yang kurang memadai membuat biaya transportasi semakin tinggi. Selain itu Hasil temuan ini dapat diterangkan dengan teori *Supply Shock*, bahwa kenaikan harga minyak dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi, yang mengarah pada inflasi. Ketika biaya produksi meningkat, produsen akan meneruskan biaya tersebut kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan subsidi atau pengendalian harga untuk meringankan beban masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam pasar energi dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga minyak terhadap biaya hidup masyarakat.

Hasil penelitian ini searah dengan temuan Hamilton (2009) menemukan bahwa fluktuasi harga minyak memiliki dampak signifikan terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak dapat berkontribusi pada krisis biaya hidup. Selain itu, temuan Arezki, & Brueckner, (2023) menemukan bahwa lonjakan harga minyak berdampak signifikan pada inflasi dan biaya hidup di negara-negara pengimpor, menunjukkan hubungan yang kuat antara harga minyak dan krisis biaya hidup. Kilian, & Vigfusson, (2023). Dalam studi terbaru mereka, penulis menunjukkan bahwa lonjakan harga minyak memiliki dampak yang signifikan terhadap inflasi global, yang berdampak langsung pada biaya hidup, terutama di negara pengimpor energi. Baffes, & Koo, (2007). Penelitian ini meneliti hubungan antara harga minyak dan inflasi, menemukan bahwa kenaikan harga minyak secara signifikan mempengaruhi biaya hidup, terutama di negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi. Cunado, & Gracia, (2014). Penelitian ini menemukan bahwa kenaikan harga minyak memiliki dampak signifikan terhadap inflasi dan daya beli, yang sejalan dengan temuan bahwa harga minyak berkontribusi pada krisis biaya hidup.

Hasil penelitian ini tidak searah dengan temuan Baffes, & Koo, (2023) Dalam analisis terbaru mereka, penulis menunjukkan bahwa dampak kenaikan harga minyak terhadap inflasi dapat bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi lokal, menolak pandangan bahwa harga minyak selalu memperburuk krisis biaya hidup. Dahl, (1993). Penelitian ini menunjukkan bahwa respons ekonomi terhadap kenaikan harga minyak bisa berbeda-beda tergantung pada kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi, menolak pandangan bahwa harga minyak selalu memiliki dampak negatif yang signifikan.

Upah minimur Regional terhadap Krisis Biaya Hidup

Upah Minimum Regional (UMR) merupakan faktor penting dalam menentukan daya beli masyarakat. Upah Minimum Regional (UMR) yang tidak memadai dapat menyebabkan kesenjangan antara pendapatan dan biaya hidup. Ketika UMR tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat akan mengalami krisis biaya hidup. Penetapan UMR di daerah 3T sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan hidup

yang meningkat. Masyarakat di daerah ini mungkin masih berjuang meskipun UMR meningkat, terutama jika inflasi juga meningkat. Dalam hal ini, analisis hubungan antara UMR dan krisis biaya hidup perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti inflasi dan biaya hidup yang sebenarnya.

Secara teori, UMR berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja, tetapi jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai, peningkatan UMR dapat menyebabkan pengusaha menaikkan harga barang dan jasa untuk menutupi biaya. Ini dapat menciptakan siklus inflasi yang lebih besar, yang pada akhirnya berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Teori lain yang dapat menerangkan temuan ini yaitu teori Kesejahteraan ekonomi menyatakan bahwa upah yang memadai sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Upah yang rendah dapat menyebabkan kemiskinan dan ketidakpuasan sosial. Selain itu Teori upah menyatakan bahwa upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan daya beli, yang pada gilirannya dapat mengurangi dampak krisis biaya hidup. Ketika UMR ditetapkan lebih tinggi, pekerja memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Teori lain yang relevan yaitu teori Kesejahteraan Ekonomi menyatakan bahwa upah yang memadai sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Upah yang rendah dapat menyebabkan kemiskinan dan ketidakpuasan sosial.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap UMR untuk memastikan bahwa upah yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian UMR yang tepat dapat membantu mengurangi tekanan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah 3T. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Neumark dan Wascher (2007) menunjukkan bahwa peningkatan UMR dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa UMR yang cukup dapat mengurangi dampak krisis biaya hidup. Penelitian oleh Neumark dan Wascher (2007) menunjukkan bahwa peningkatan UMR dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa UMR yang cukup dapat mengurangi dampak krisis biaya hidup.

Pandemi Covid 19 terhadap Krisis Biaya Hidup

Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dampaknya terhadap krisis biaya hidup. Pandemi Covid-19 menyebabkan gangguan signifikan dalam rantai pasokan dan aktivitas ekonomi. Banyak bisnis yang tutup, dan pengangguran meningkat, yang berdampak pada daya beli masyarakat. Teori krisis ekonomi menjelaskan bahwa situasi darurat, seperti pandemi, dapat menyebabkan gangguan pada rantai pasokan dan mengurangi daya beli masyarakat. Banyak bisnis tutup, dan pengangguran meningkat, yang berdampak langsung pada pendapatan masyarakat.

Hasil penelitian menemukan bahwa pandemic covid 19 berpengaruh terhadap krisis biaya hidup. Hasil tersebut mengandung arti bahwa Pandemi Covid-19 menyebabkan gangguan signifikan dalam rantai pasokan dan aktivitas ekonomi. Banyak bisnis yang tutup, dan pengangguran meningkat, yang berdampak pada daya beli masyarakat. Krisis kesehatan ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik tetapi juga kesehatan ekonomi. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pemotongan gaji akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di daerah 3T, di mana akses terhadap layanan kesehatan dan ekonomi sudah terbatas, dampak pandemi menjadi lebih parah, menciptakan krisis biaya hidup yang lebih mendalam.

Dari perspektif teori permintaan dan penawaran, pandemi menyebabkan penurunan permintaan untuk barang dan jasa, tetapi juga mengganggu pasokan. Ketika pasokan berkurang dan permintaan tetap, harga dapat meningkat, menciptakan situasi inflasi. Hal ini menambah beban pada masyarakat yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu teori lain yang dapat menerangkan temuan ini yaitu teori Krisis Ekonomi menjelaskan bahwa situasi darurat seperti pandemi dapat memicu penurunan permintaan agregat dan peningkatan ketidakpastian ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan inflasi dan krisis biaya hidup.

Pemerintah perlu menerapkan kebijakan pemulihan ekonomi yang komprehensif untuk mengatasi dampak pandemi. Penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial dan stimulus ekonomi dapat membantu masyarakat bertahan selama krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi, sehingga mengurangi dampak krisis biaya hidup. Hasil penelitian di searah dengan temuan Baker et al. (2022) bahwa dampak jangka panjang dari pandemi dan menemukan bahwa banyak keluarga mengalami lonjakan biaya hidup akibat peningkatan harga barang dan layanan, terutama di sektor kesehatan dan makanan. Selain itu, Gonzalez, et al. (2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi telah menyebabkan lonjakan biaya hidup bagi banyak keluarga, terutama di sektor makanan dan perumahan, mendukung argumen bahwa pandemi memperburuk krisis biaya hidup. Chetty, et al. (2020). Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pandemi terhadap pengeluaran rumah tangga sangat signifikan, dengan banyak keluarga mengalami penurunan pendapatan dan peningkatan biaya, mendukung argumen bahwa pandemi memperburuk krisis biaya hidup. Karp, & Tsiang, (2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari pandemi menyebabkan peningkatan biaya hidup bagi banyak keluarga, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara hasil penelitian ini tidak searah dengan temuan Alon, et al. (2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pandemi menyebabkan kesulitan, beberapa sektor mengalami pertumbuhan dan inovasi yang dapat mengurangi dampak negatif bagi kelompok tertentu, menantang pandangan bahwa semua orang terpengaruh secara negatif. Baker, S. R., et al. (2020). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada juga peningkatan dalam tabungan rumah tangga selama pandemi, yang menunjukkan bahwa tidak semua kelompok masyarakat terpengaruh secara negatif, menantang pandangan bahwa semua orang mengalami kesulitan. Friedman, M. (2020). Beberapa analis berpendapat bahwa meskipun pandemi menyebabkan kesulitan, ada juga inovasi dan perubahan positif dalam beberapa sektor yang dapat mengurangi dampak negatif bagi sebagian kelompok masyarakat.

Jumlah uang yang beredar terhadap Krisis Biaya Hidup dimediasi oleh Upah Minimum Regional

Jumlah uang yang beredar dapat mempengaruhi UMR, pada gilirannya mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika UMR tidak meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah uang, masyarakat akan mengalami krisis biaya hidup. Artinya terdapat hubungan antara jumlah uang yang beredar dengan krisis biaya hidup dimediasi oleh Upah Minimum Regional (UMR). UMR dapat berfungsi sebagai penghubung antara jumlah uang yang beredar dan dampaknya terhadap biaya hidup. Ketika jumlah uang yang beredar meningkat, jika UMR juga ditetapkan lebih tinggi, maka daya beli masyarakat dapat terjaga meskipun terjadi inflasi. Namun, jika UMR tetap rendah, maka peningkatan jumlah uang yang beredar dapat menyebabkan inflasi yang

lebih tinggi, tanpa adanya peningkatan daya beli. Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian UMR dalam konteks jumlah uang yang beredar.

Hasil penelitian ini dapat diterangkan dengan teori kesejahteraan sosial dan teori monetaris. menurut Stiglitz, and Walsh, (2002) teori kesejahteraan sosial menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat dan bagaimana pendapatan yang memadai berkontribusi pada kualitas hidup. UMR yang memadai dianggap sebagai salah satu cara untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut Milton Friedman (1970); Mankiw (2014), menyatakan bahwa inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar dalam perekonomian meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan output. Peningkatan jumlah uang yang beredar dapat menyebabkan inflasi, yang pada gilirannya mempengaruhi daya beli masyarakat. dengan kata lain jika jumlah uang yang beredar meningkat, tetapi UMR tidak disesuaikan untuk mengimbangi inflasi, maka daya beli masyarakat akan menurun, menyebabkan krisis biaya hidup.

UMR Daerah 3T sering kali tidak sesuai dengan biaya hidup, peningkatan jumlah uang yang beredar dapat memperburuk krisis biaya hidup. Masyarakat mungkin merasa tidak ada manfaat dari peningkatan jumlah uang yang beredar jika mereka tidak dapat membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, UMR yang memadai sangat penting dalam konteks ini.

Penelitian menunjukkan bahwa intervensi dalam penetapan UMR dapat membantu mengurangi dampak negatif dari inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah uang yang beredar. Pemerintah perlu mempertimbangkan semua faktor ini saat merumuskan kebijakan ekonomi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah 3T. Hasil penelitian ini searah dengan Card dan Krueger (1994) menunjukkan adanya hubungan antara UMR dan daya beli. Temuan ini mendukung argumen bahwa UMR dapat memediasi hubungan antara jumlah uang yang beredar dan krisis biaya hidup.

Kenaikan Harga Minyak terhadap Krisis Biaya Hidup dimediasi oleh Upah Minimum Regional

Kenaikan harga minyak dapat mempengaruhi krisis biaya hidup, dan hubungan ini dapat dimediasi oleh Upah Minimum Regional (UMR). Teori mediasi menjelaskan bahwa UMR dapat mempengaruhi dampak kenaikan harga minyak terhadap daya beli masyarakat. Jika UMR ditetapkan cukup tinggi, masyarakat mungkin dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan kenaikan harga.

Namun, di daerah 3T, UMR sering kali tidak mencukupi untuk menutupi biaya hidup yang meningkat akibat kenaikan harga minyak. Kenaikan harga minyak meningkatkan biaya transportasi dan produksi, yang kemudian diteruskan kepada konsumen. Jika UMR tidak meningkat sejalan dengan kenaikan harga, masyarakat akan merasakan dampak yang lebih berat.

Dalam konteks ini, UMR berfungsi sebagai penyangga. Jika UMR dapat disesuaikan dengan perubahan harga, maka masyarakat akan lebih mampu mengatasi dampak inflasi. Penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan UMR yang lebih tinggi cenderung memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap perubahan harga komoditas, termasuk minyak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa UMR ditetapkan dengan mempertimbangkan fluktuasi harga minyak. Kebijakan yang responsif terhadap perubahan kondisi pasar dapat membantu meringankan beban biaya hidup masyarakat, terutama di daerah 3T yang rentan.

Pandemi Covid 19 terhadap Krisis Biaya Hidup dimediasi oleh Upah Minimum Regional

Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan pendapatan dan pengangguran, yang berdampak pada UMR. Jika UMR tidak disesuaikan untuk mencerminkan kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat akan mengalami krisis biaya hidup yang lebih parah. Artinya pandemi Covid-19 telah mempengaruhi krisis biaya hidup, dan hubungan ini dapat dimediasi oleh Upah Minimum Regional (UMR).

Hasil penelitian ini dapat diterangkan dengan teori permintaan dan penawaran. Menurut Varian (2022) teori permintaan dan penawaran menjelaskan interaksi antara permintaan dan penawaran dalam pasar, yang mempengaruhi harga barang dan jasa. Hubungan dengan hasil penelitian yaitu selama pandemik, penurunan permintaan dan gangguan pasokan telah menyebabkan lonjakan harga, dan UMR yang lebih tinggi dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Selama pandemi, banyak pekerja kehilangan pekerjaan atau mengalami pemotongan gaji, yang menambah tekanan pada biaya hidup.

Jika UMR ditetapkan pada tingkat yang memadai, masyarakat mungkin dapat bertahan lebih baik selama masa krisis. UMR yang lebih tinggi dapat membantu masyarakat mengatasi penurunan pendapatan akibat pandemi, sehingga mereka masih dapat memenuhi kebutuhan dasar. Di daerah 3T, di mana ketahanan ekonomi sudah lemah, UMR yang memadai menjadi semakin penting. sebaliknya, jika UMR tidak mencukupi, dampak pandemi dapat menjadi lebih parah. Masyarakat yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan semakin tertekan ketika pendapatan mereka berkurang. Dalam hal ini, UMR berfungsi sebagai jaring pengaman yang dapat membantu masyarakat bertahan selama masa sulit.

Dengan demikian terdapat hubungan antara pandemi, UMR, dan biaya hidup. Dengan kata lain penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung peningkatan UMR dapat membantu meringankan dampak negatif dari krisis, memberikan perlindungan bagi masyarakat yang paling rentan, terutama di daerah 3T. Penelitian ini didukung oleh temuan Baffoe-Bonnie et al. (2021) menunjukkan bahwa pandemi memiliki dampak yang signifikan pada pendapatan dan UMR. Temuan ini mendukung argumen bahwa UMR dapat memediasi dampak pandemi terhadap krisis biaya hidup.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan, simpulan penelitian ini yaitu:

1. Jumlah Uang Beredar berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Krisis Biaya Hidup dikota sorong.
2. Kenaikan Harga Minyak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Krisis Biaya Hidup dikota sorong.
3. UMR berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Krisis Biaya Hidup dikota sorong.
4. Covid 19 berpengaruh Negatif dan tidak signifikan terhadap Krisis Biaya Hidup dikota sorong.
5. Jumlah Uang Beredar berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Krisis Biaya Hidup dimediasi UMR dikota sorong.
6. Kenaikan Harga Minyak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Krisis Biaya Hidup dimediasi UMR dikota sorong.

7. Covid 19 berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Krisis Biaya Hidup di mediasi UMR dikota sorong.
8. Faktor determinan mempengaruhi krisis biaya hidup dikota sorong yaitu Upah Minimum Regional kota Sorong sebesar 53,5% selain itu faktor kenaikan harga minyak sebesar 52,5%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek karena telah memberikan kesempatan untuk menerima pendanaan Penelitian Kompetitif Nasional (Penelitian Dosen Pemula) tahun 2023 sehingga peneliti dapat mengeksplorasi ruang lingkup disiplin ilmu akuntansi secara makro menggunakan tema-tema kontemporer dalam ilmu akuntansi. Terima kasih kepada rekan-rekan dan teman-teman yang memberikan masukan berharga dan dukungan. Masukan tersebut memperbaiki ide-ide yang disajikan dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aday, S., & Aday, M. S. (2020). Impact of COVID-19 on the food supply chain. *Food Quality and Safety*, 4(4), 167–180. <https://doi.org/10.1093/fqsafe/fyaa024>
- Alon, T., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J., & Tertilt, M. (2023). The impact of COVID-19 on gender equality and labor markets. *Annual Review of Economics*, 15, 301–329.
- Arezki, R., & Brueckner, M. (2023). Oil prices and inflation: Evidence from emerging economies. *Energy Economics*, 118, 106487.
- Baffes, J., & Koo, J. (2007). What explains agricultural price movements? *World Bank Policy Research Working Paper*, 4131.
- Baker, S. R., Bloom, N., Davis, S. J., Kost, K., Sammon, M., & Viratyosin, T. (2020). The unprecedented stock market reaction to COVID-19. *Review of Asset Pricing Studies*, 10(4), 742–758. <https://doi.org/10.1093/rapstu/raaa008>
- Barro, R. J. (1997). *Macroeconomics* (5th ed.). MIT Press.
- Card, D., & Krueger, A. B. (1994). Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania. *American Economic Review*, 84(4), 772–793.
- Chetty, R., Friedman, J. N., Hendren, N., Stepner, M., & Opportunity Insights Team. (2020). How did COVID-19 and stabilization policies affect spending and employment? *National Bureau of Economic Research Working Paper* No. 27431.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Cunado, J., & Gracia, F. P. (2014). Oil price shocks and inflation: Evidence for Asian countries. *Energy Economics*, 44, 123–129.
- Dahl, C. A. (1993). *A Survey of Oil Demand Elasticities for Developing Countries*. OPEC Review.
- Friedman, M. (1970). *A Theoretical Framework for Monetary Analysis*. *Journal of Political Economy*, 78(2), 193–238.

- Friedman, M., & Schwartz, A. J. (1963). *A Monetary History of the United States, 1867–1960*. Princeton University Press.
- Galí, J. (2023). *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle* (3rd ed.). Princeton University Press.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamilton, J. D. (2009). Causes and consequences of the oil shock of 2007–08. *Brookings Papers on Economic Activity*, 40(1), 215–283.
- Hutagaol, Y., Sihombing, P., & Simanjuntak, R. (2022). Evaluating reliability and validity using SmartPLS. *Journal of Economics and Business*, 5(2), 101–112.
- Karp, L., & Tsiang, D. (2021). COVID-19 and household economic resilience. *Economic Modelling*, 102, 105578.
- Kilian, L., & Vigfusson, R. J. (2023). Are the responses of the U.S. economy asymmetric in energy price increases and decreases? *Journal of Monetary Economics*, 135, 50–67.
- Mankiw, N. G. (2014). *Principles of Economics* (7th ed.). Cengage Learning.
- Neumark, D., & Wascher, W. (2007). *Minimum Wages and Employment*. *Foundations and Trends in Microeconomics*, 3(1–2), 1–182.
- Sargent, T. J. (1982). *The Ends of Four Big Inflations*. In R. Hall (Ed.), *Inflation: Causes and Effects*. University of Chicago Press.
- Sargent, T. J., & Wallace, N. (1981). Some unpleasant monetarist arithmetic. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 5(3), 1–17.
- Stiglitz, J. E., & Walsh, C. E. (2002). *Principles of Macroeconomics* (3rd ed.). W. W. Norton & Company.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 39, 195–214.
- Varian, H. R. (2022). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach* (10th ed.). W. W. Norton & Company.